

tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Bank Jatim merupakan bank konvensional yang peka terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga Bank Jatim membentuk Unit Usaha Syariah yang didirikan berdasarkan Surat Bank Indonesia Nomor 9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007 perihal : persetujuan prinsip pendirian Unit Usaha Syariah (UUS), pembukaan kantor cabang syariah dan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta surat Bank Indonesia Nomor 9/148/DPIP/Prz/Sb tanggal 24 Juli 2007 perihal : izin pembukaan kantor cabang syariah.

Operasional Bank Jatim Syariah diresmikan pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2007 bertepatan dengan tanggal 8 Syaban 1428 H. Dalam perjalanannya selama tujuh tahun beroperasi Bank Jatim Syariah telah hadir dengan banyak melakukan pengembangan dan inovasi guna memberikan layanan *financial* yang terbaik sesuai kebutuhan nasabah melalui beragam produk dengan prinsip syariah.

Pelayanan menjadi salah satu unsur penting dalam pengembangan bisnis bank. Terkait dengan hal itu, Bank Jatim Syariah berkomitmen untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam bertransaksi melalui perluasan jaringan, baik jaringan kantor, layanan syariah, maupun *electronic channel* berupa ATM (*Automatic Teller Machine*, *SMS Banking*, EDC dan *Mobile Banking*).

- 2) Menganalisa permohonan pembiayaan, bank garansi dengan plafond sesuai wewenangnya;
- 3) Melakukan koordinasi dengan kantor pusat berkaitan dengan penyaluran kredit dengan jumlah plafond tertentu yang pemrosesan permohonan pembiayaannya dilaksanakan oleh kantor pusat, serta menyelenggarakan kegiatan administrasi pembiayaan ;
- 4) Mengadakan supervisi dan penagihan atas pembiayaan yang tergolong lancar dan dalam perhatian khusus yang telah direalisasi;
- 5) Memantau aktifitas pemberian pembiayaan menengah dan penagihan kredit menengah yang bermasalah;
- 6) Melaksanakan kegiatan penyelesaian pembiayaan bermasalah baik secara sendiri maupun berkoordinasi dengan divisi pembiayaan khusus, antara lain :
 - a. Melaksanakan upaya penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah (kurang lancar, diragukan, macet dan dihapus bukukan) serta mengupayakan langkah-langkah penyelamatan;
 - b. Melaksanakan tindakan pengamanan atas barang jaminan baik secara fisik maupun yuridis dan mengupayakan tindak lanjut penyelesaiannya;

Karakteristik:

- 1) Menggunakan akad *Murābahah*
- 2) Jangka waktu pembiayaan : Pegawai Negeri Sipil maksimal 8 (delapan) tahun, purnawirawan dan pensiunan PNS maksimal 5 (lima) tahun, pegawai tetap dari perusahaan swasta/yayasan/koperasi *bonafide* maksimal 5 (lima) tahun.
- 3) Maksimal Pembiayaan : Pegawai Negeri Sipil sebesar 80% dari gaji yang diterima oleh nasabah, purnawirawan dan pensiunan PNS sebesar 80% dari hak pensiun yang diterima nasabah, pegawai tetap dari perusahaan swasta/yayasan/koperasi *bonafide* sebesar 60% dan gaji yang diterima nasabah.
- 4) Pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan penalti.
- 5) Perlindungan asuransi syariah
- 6) Angsuran tetap sampai dengan jatuh tempo pembiayaan.

Persyaratan Menjadi Nasabah Pembiayaan Multiguna:

- 1) Mengisi formulir permohonan
- 2) Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan berwenang melakukan tindakan hukum (telah dewasa menurut hukum dan tidak berada dalam pengampuan) sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Fotokopi KTP, KSK, NIP atau kartu pegawai yang masih berlaku.

Karakteristik :

Plafond pinjaman mulai Rp 15 juta sampai 23 juta

Persyaratan :

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Memiliki rekening tabungan haji Amanah minimal Rp 4.530.000,-
- 3) Menyerahkan formulir SPPH yang diterbitkan Kandepag setempat
- 4) Menyerahkan surat kuasa kepada bank untuk memotong/mendebet rekening
- 5) Menyerahkan surat kuasa pembatalan porsi haji
- 6) Tidak memiliki pinjaman bermasalah di bank
- 7) Telah memenuhi syarat - syarat yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjadi calon jamaah haji

Fasilitas :

- 1) Dana talangan haji maksimal Rp 23 juta
- 2) Jangka waktu pelunasan fasilitas Qardh maksimal 12 (dua belas) bulan sejak akad pembiayaan Qard dan tidak dapat diperpanjang
- 3) Pelunasan sebesar pokok pinjaman (tanpa margin/kelebihan atas pokok)
- 4) Pelunasan pinjaman secara sekaligus saat jatuh tempo
- 5) Pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan denda
- 6) Biaya administrasi dibayarkan di muka pada saat pencairan fasilitas Qardh

- a) Nasabah datang ke Bank Jatim Syariah mengajukan pembiayaan Multiguna (misal : untuk pembelian sebuah kendaraan pribadi). Bank meminta Nasabah melengkapi persyaratan permohonan pembiayaan. Jika persyaratan telah lengkap, selanjutnya bank melakukan analisa kelayakan pembiayaan.
- b) Jika bank menilai nasabah layak untuk dibiayai, maka bank akan memberikan surat persetujuan prinsip pembiayaan kepada nasabah (surat penawaran). Setelah proses negosiasi, nasabah berjanji untuk melakukan transaksi *Murābahah* dengan bank jika bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah.
- c) Berdasarkan kebutuhan nasabah, bank melakukan transaksi pembelian kendaraan dengan *dealer* sesuai kualifikasi kendaraan yang disepakati. Bank dalam hal ini dapat pula mewakilkan kepada nasabah (*wakalah*) untuk melakukan transaksi dengan *dealer*.
- d) Setelah barang secara prinsip menjadi milik bank, nasabah dan bank dapat melakukan akad pembiayaan *Murābahah*.
- e) Bank dapat memberi kuasa/mewakilkan kepada *dealer* untuk menyerahkan kendaraan kepada nasabah (dalam hal penyerahan tidak dilakukan secara langsung oleh bank).
- f) *Dealer* menyerahkan kendaraan kepada nasabah.

yang akurat dan memadai memegang peranan yang sangat penting, karena apabila data yang dianalisa tidak benar, maka hasil analisisnya juga tidak tepat. Pengumpulan data harus diarahkan pada pengumpulan informasi yang lengkap, akurat dan *up to date*, dilakukan secara langsung dan aktif dari nasabah, pihak ketiga dan sumber data lainnya. Dilanjutkan dengan verifikasi data yang dimaksudkan untuk menentukan kewajaran, ketepatan dan kebenaran data dan informasi yang telah terkumpul. Sebelum membuat nota pembahasan pembiayaan, analis pembiayaan harus melakukan verifikasi/*re-check* dengan cara memeriksa langsung ke tempat tinggal dan kantor/instansi dimana calon nasabah bekerja disertai dengan penelitian dokumen terkait.

7. Analisa Data dan Pembuatan Usulan Pembiayaan.

Setelah semua data dan informasi pendukung terkumpul, maka analis pembiayaan dan pejabat yang berwenang dapat memulai proses penilaian, analisa data serta pembuatan usulan pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku.

